

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2008 TERKAIT PELANGGARAN IZIN PEMASANGAN
REKLAME DI KABUPATEN SAMPANG**

(Studi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal,
Satpol PP Kabupaten Sampang)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ARSA BANDI
0710113151**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

ABSTRAK

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah yang proaktif. Salah satu peran serta pemerintah selaku penguasa terhadap aktifitas masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinan. Melalui perizinan pemerintah mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan kita, namun banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Kata kunci: *Implementasi, pasal 12 Perda Nomor 16 tahun 2008*

ABSTRACT

Governments have a duty and responsibility to promote the welfare of its citizens. Therefore, the government takes a proactive stance. One role of the government as the ruler of the activity of the community is through the licensing mechanism. Through licensing government regulates everything from directing, implementing even control. Licensing is one important aspect of public service. Although it is not required every day but very important role in our lives, but many can not because we do license is important evidence legally. No other part of the public domain where the interaction between the government and the people so clearly and directly than in the license service. As the vanguard of government services to the community, we can say the performance of the government as a whole is really judged on how well the service's licensing unit.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelanggaran-pelanggaran atas izin reklame di Kabupaten Sampang, mengakibatkan adanya pembongkaran paksa yang dilakukan Satpol PP, karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan Negara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi oleh beberapa hal, misalnya adanya papan reklame yang terpasang belum memperoleh izin, dan melanggar izin lokasi. Selain itu tidak jarang pemasangan reklame yang telah jatuh tempo tetap terus terpasang tanpa adanya perpanjangan izin. Terdapat kemungkinan pemilik reklame menghindari pengurusan izin karena adanya anggapan bahwa dalam pengurusan izin harus melewati birokrasi yang berbelit belit, memerlukan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang tanpa disadari, tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Selain dilakukan pemilik reklame, pelanggaran dalam izin reklame juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Contoh pelanggaran tersebut adalah adanya pemberian izin dari pihak Pemkab terhadap reklame rokok yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang didirikan reklame yang merupakan zona bebas reklame. Contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa, di samping dapat memberikan manfaat positif bagi pengguna produk atau masyarakat awam, reklame tidak jarang dapat menimbulkan dampak negative.

Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Sampang telah diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 16 tahun 2008 disebutkan, bahwa pemasangan reklame dapat dibongkar apabila: a). tidak memiliki izin; b). masa berlakunya habis; c). reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan; d). tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melanggar norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain.¹ Mengacu pada hasil observasi di Kabupaten Sampang, masih terdapat pelanggaran perizinan reklame di daerah ini, sehingga diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang?
- b. Apa hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

¹ Pasal 12 Perda Kabupaten Sampang No 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame

3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang.
- b. Mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame dan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perizinan

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru pada masyarakat tentang arti pentingnya izin, khususnya dalam izin pemasangan reklame.

2. Bagi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Sampang

a) Sebagai bahan masukan yang objektif atau sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang demi meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga di masa yang akan datang.

b) Untuk membantu memasyarakatkan perizinan khususnya mengenai izin penyelenggaraan reklame agar dapat diketahui oleh semua kalangan masyarakat tentang tata cara dan batas waktu perizinan yang ditentukan dalam memasang reklame.

3. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Untuk membantu memasyarakatkan Perda dan aturan lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada dalam lingkup perizinan, khususnya izin reklame berdasarkan Perda yang ada. Selain itu.

5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai: 1. Reklame yang terdiri dari pengertian iklan, pengertian reklame, sifat umum dari reklame, maksud dan tujuan reklame, jenis-jenis Reklame. 2. Izin, yang terdiri

dari pengertian izin, tujuan dikeluarkannya izin. 3. Izin reklame, yang terdiri dari pengertian izin reklame, tujuan dikeluarkannya izin reklame, waktu penyelesaian izin reklame, standar reklame, kewajiban penyelenggara reklame, larangan penyelenggara reklame, tata cara perizinan reklame, tata cara pemasangan reklame, pajak reklame.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang mencakup, jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum Kabupaten Sampang, gambaran umum Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang. Selanjutnya penulis mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame. Faktor-faktor yang menghambat sekaligus upaya penanggulangannya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang agar mematuhi pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame pasal 12.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari model penelitian, penelitian ini juga bisa disebut jenis penelitian hukum *empiris* atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu obyek secara sistimatis.² Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum empiris.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal 12 Perda no 16 tahun 2008 terkait pelanggaran izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang.

3. Lokasi Penelitian

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998),hlm: 43

Lokasi peneltian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Sampang ini adalah banyaknya pelanggaran dalam pemasangan reklame, seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi di Kabupaten Sampang yang tidak teratur dengan tidak memperhatikan tata letak dan situasi jalan.³ Sedangkan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang adalah merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat izin, dalam hal ini izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang.

4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan atau instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang. Data primer yang di ambil langsung misalnya: hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perizinan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perizinan reklame.
- b. Data Sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.⁴ Dimana data sekunder meliputi skema dan prosedur perizinan penyelenggaraan reklame, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang relevan terhadap masalah tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada responden khususnya mengenai prosedur perizinan, syarat-syarat perizinan, kendala- kendala dalam pengajuan perizinan, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan izin penyelenggaraan reklame.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan teknik *Library Research* yaitu metode pengumpulan data melalui telaah kepustakaan berupa buku/literatur ilmiah tentang studi permasalahan yang sesuai. Sedang data yang diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berkenaan dengan topik permasalahan mengenai reklame sesuai dengan penelitian ini.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.
- b. Pengambilan sampel menggunakan *puposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data.⁵ Dalam hal ini:
 - 1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.
 - 2) Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kabupaten Sampang.

³ Hasil survey tgl 20-02-2012

⁴ Ibid

⁵ Hasan, M Tholchah dkk “*Metode Penelitian Kualitatif*” Malang: Lembaga Penelitian UNISMA, 2003, hlm: 142

3) Tim Teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang

4) Pemasang Reklame (5 orang)

Sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) responden

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yakni bentuk analisis yang diawali dengan mendeskripsikan fenomena yang menjadi isu hukum di masyarakat. Selanjutnya ditelaah menurut konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

8. Definisi Operasional

a. Implementasi

Implementasi bisa menjadi tolok ukur tepat tidaknya, akurat tidaknya, relevan tidaknya, dan realistis tidaknya suatu rumusan kebijakan.

b. Reklame

Perda Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang retribusi izin pemasangan reklame, menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau terhadap suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan oleh Pemerintah Daerah

c. Pemerintah Daerah

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang retribusi izin pemasangan reklame

Reklame pada dasarnya adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat memperkenalkan produk yang dimiliki perusahaan kepada konsumen dalam perdagangan. Reklame dibuat agar dapat menarik perhatian bagi orang yang membaca atau melihat sehingga dapat tertarik dengan apa yang dimuat dalam reklame tersebut. Namun dalam pemasangan reklame di Kabupaten Sampang tidak sedikit pemasangan reklame secara liar yang dinilai melanggar peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan.

“Terkait dengan pemasangan reklame tanpa izin ini kami meminta agar Pemkab setempat membongkar semua reklame liar yang ada di sekitar

*jalan provinsi di Kabupaten Sampang. Hal ini juga diakui oleh KP3M Sampang bahwa banyak reklame liar di Sampang tanpa izin yang jelas”.*⁶

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masih banyaknya pemasangan reklame liar di Kabupaten Sampang, sehingga diperlukan upaya serius Pemkab Sampang agar serius mengimplementasikan peraturan yang berlaku, khususnya perda pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 16 tahun 2008. Bahwa pemasangan reklame dapat dibongkar apabila: a). tidak memiliki izin; b). masa berlakunya habis; c). reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan; d). tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain melanggar norma agama, norma kesusilaan dan lain-lain.

Setiap orang atau badan usaha yang memasang reklame wajib memiliki izin pemasangan reklame dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan. Izin reklame ini dikenakan untuk jenis reklame tetap terbatas dan reklame insidentil. Dengan demikian menjadikan penting proses perizinan dalam pemasangan reklame dalam hal ini prosedur pemberian Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Oprasional Satpol PP:⁷

“Menegenai prosedur pemberian Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan yang ada, pihak pemasang reklame harus mengajukan permohonan, setelah mengajukan permohonan dan sesuai dengan keadaan di lapangan, berapa titik pemasangan baru izin dikeluarkan”

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam upaya penertiban pemasangan reklame, perlu diadakan survey lokasi yang intinya setiap pemasangan reklame komersial dan non komersial baik dari segi masalah pendidikan, sosial maupun Pemerintahan wajib memiliki ijin pemasangan reklame sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008.

Selanjutnya informan mengutarakan, bahwa bila seseorang hendak mengajukan ijin pemasangan reklame harus melampirkan beberapa persyaratan. Yaitu, menyerahkan foto copy KTP penanggungjawab bagi perorangan dan menyerahkan profil lembaga atau perusahaan bagi lembaga dan perusahaan. Selain itu, denah lokasi tempat reklame akan dipasang harus dilampirkan. Di samping itu juga harus ada persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai dengan foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian serta surat persetujuan dari lurah atau kepala desa setempat. Dengan demikian Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang menghimbau kepada seluruh masyarakat mengenai pemasangan reklame, sebagai berikut:⁸

⁶ Hasil wawancara dengan Koordinator Forum Masyarakat Sampang Bersatu. Tgl 28 Juli 2012

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Oprasional Satpol PP Kabupaten Sampang pada tanggal 2 Agustus 2012

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang)

“Kami menghimbau kepada orang yang akan mendirikan dan memasang reklame supaya segera mengajukan permohonan izin pemasangan. Reklame tidak boleh didirikan atau dipasang sebelum ada perintah dan persetujuan yang nantinya akan dipasang stiker dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang sebagai tanda regalitas pada masing-masing reklame”

Lebih lanjut dikatakannya, mendekati masa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti, saat ini reklame ataupun bener sudah mulai marak terpasang di berbagai tempat, itupun harus berijin, jika tidak maka staf Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang bersama-sama Satpol PP akan menurunkannya jika peringatan yang diberikan diabaikan. Selama ini, pihaknya masih melakukan sebagai mana yang ada dan diatur dengan peraturan daerah tersebut, apa lagi masalah pemasangan reklame masih menjadi wewenang dari Perijinan. Berikut ini adalah prosedur perizinan dalam pemasangan reklame Kabupaten Sampang:⁹

1. Pemohon meminta informasi mengenai izin pemasangan reklame ke loket informasi kemudian petugas loket memberikan informasi tentang pemasangan reklame
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
3. Bagian proses mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan tim teknis dan jika tidak perlu langsung diproses
4. Membuat surat undangan kepada tim teknis untuk pembahasan
5. Berdasarkan pembahasan tim teknis dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuat rekomendasi teknis
6. Rekomendasi tim teknis, apakah diizinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan kepada bagian proses untuk penerbitan surat izin pemasangan reklame, bila tidak diizinkan berkas dikembalikan kepada pemohon
7. Bagian proses mengolah pembuatan surat izin pemasangan reklame dan penetapan retribusi
8. Penandatanganan izin oleh kepala kantor Perizinan dan Penanaman Modal
9. Registrasi surat izin pemasangan reklame dan pengarsipan dan pemberian surat izin pemasangan reklame

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasang reklame adalah sebagai berikut:

1. Gambar/alat-alat reklame serta perhitungann biaya
2. Surat keterangan penggunaan/pemilikan tanah/sewa
3. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dimana reklame dipasang

pada tanggal 3 Agustus 2012

⁹ Dokumen Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang

4. Foto copi surat izin yang telah dilegalisir bagi pengajuan perpanjangan izin yang telah dilegalisir
5. Berita acara persetujuan/penolakan terhadap pengajuan permohonan izin pemasangan reklame.

Sedangkan besarnya retribusi izin pemasangan dan pembongkaran reklame ditetapkan sebagai berikut:

1. Reklame papan, dengan tarif izin sebesar 5000/m² dan biaya pembongkaran reklame 2000/m²
2. Reklame kain, dengan tarif izin sebesar 5000/m² dan biaya pembongkaran reklame 2000/m²
3. Reklame disinari listrik, dengan tarif izin sebesar 5000/m² dan biaya pembongkaran reklame 2000/m²
4. Reklame kendaraan dengan tarif izin sebesar 10.000/m²
5. Reklame selebaran/stiker, dengan tarif izin sebesar 50/lembar dan biaya pembongkaran sebesar 15/lembar
6. Reklame tinsplate, dengan tarif izin sebesar Rp. 3500/m² dan biaya pembongkaran sebesar Rp. 500/buah
7. Reklame slide bersuara dengan tarif izin sebesar Rp. 1000/menit
8. Reklame tidak slide bersuara dengan tarif izin sebesar Rp. 1000/menit
9. Reklame suara melalui radio dengan tarif izin sebesar Rp. 1000/menit
10. Reklame mekanis dengan tarif izin sebesar Rp. 5000/m² dan biaya pembongkaran sebesar Rp. 2000/menit
11. Reklame non mekanis dengan tarif izin sebesar Rp. 3000/m² dan biaya pembongkaran sebesar Rp. 2000/m²
12. Reklame sponsor dengan tarif izin sebesar Rp. 5000/kegiatan
13. Reklame film slide dengan tarif izin sebesar Rp. 50/menit
14. Reklame film bersuara dengan tarif izin sebesar Rp. 100/menit

Sedangkan jenis izin atau izin pemasangan dan pembongkaran reklame menurut masa berlaku, bahwa reklame permanen (reklame papan, billboard, mini billboard, reklame disinari listrik, reklame kendaraan) masa berlaku 1 (satu) tahun. Reklame nonpermanen (reklame kain, selebaran, stiker, tinsplate) masa berlaku selama 1 (satu) bulan. Selain itu terdapat pihak-pihak yang memberikan pertimbangan atas pemasangan reklame, diantaranya adalah:

1. BPJ Propinsi/DPU Bina Marga
2. Dinas Pendapatan Daerah
3. Dinas Perhubungan
4. Bagian hukum setda
5. Bagian perlengkapan setda
6. Bagian pemerintahan/Kecamatan
7. Satpol PP dan Cikartarung

Dengan perkembangan pembangunan perekonomian khususnya media promosi reklame semakin pesat, maka dipandang perlu diadakan penertiban pemberian izin pemasangan serta pengendalian dan pengawasan terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Sampang. Namun selama ini pemberian Izin

Pemasangan Reklame sudah sesuai dengan syarat perizinan, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Operasional Satpol PP, sebagai berikut:¹⁰

“Selama ini yang saya ketahui mengenai pemberian izin dalam pemasangan reklame di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan maupun perda yang berlaku antara lain tidak melanggar norma agama dan norma kesusilaan”

Dengan mengacu pada hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pentingnya melaksanakan perda yang ada, khususnya pasal 12 Perda nomor 16 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang, dimana pemasangan benar dan reklame dalam bentuk apapun masih dalam wewenang pemerintah daerah dalam hal ini pihak Perijinan. Karena itu pihak Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang akan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemasang reklame, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, sebagai berikut:¹¹

“Kami selalu tegas terhadap setiap pelanggaran, khususnya reklame liar akan kami tertibkan namun kami tetap akan bicarakan dahulu dengan pemilik reklame. Apabila melanggar norma susila dan agama dalam memasang reklame maka pemohon dipanggil yang kemudian reklame diturunkan paksa walaupun sudah membayar retribusi”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat jelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ini, pihaknya bersama dinas terkait tanggal 11 Agustus mendatang akan memanggil para pemilik reklame dan meminta mereka untuk memenuhi peraturan yang ada, agar tidak timbul problema baru. Karena selama ini masih terdapat beberapa reklame yang melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh informan penelitian:¹²

“Yang saya tahu masih ada pelanggaran dalam pemasangan reklame, seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi di Kabupaten Sampang yang tidak teratur dan dipasang tidak beraturan dengan tidak memperhatikan tata letak dan situasi jalan, sehingga mengganggu keindahan”.

Kondisi ini akan mempengaruhi keindahan wilayah juga ketidak teraturan dalam pemasangan reklame ini dapat mengurangi pendapatan pajak dari Dinas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kabupaten Sampang pada tanggal 2 Agustus 2012

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Agustus 2012

¹² Hasil wawancara dengan Pemasang Reklame di Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Agustus 2012

Perijinan. Diperkirakan jika dilakukan penertiban, maka diperoleh peningkatan pada sektor pajak reklame. Demi tegaknya peraturan daerah (perda) dan terciptanya kebersihan, keamanan dan keindahan (K3), para petugas Tramtib di kantor kecamatan maupun kelurahan di wilayah Sampang diminta bersikap tegas apabila menemukan adanya pemasangan papan reklame tidak sesuai tata ruang. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang:¹³

“Sesuai tugas pokok dan fungsinya, petugas Tramtib di wilayah kecamatan maupun kelurahan adalah penegak peraturan daerah, sehingga apabila ada kegiatan pembangunan seperti reklame yang tidak sesuai pemasangan agar dilarang, apalagi jika pemasangan reklame di trotoar”.

Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyamanan publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain.

Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.

Bagi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, reklame merupakan salah sumber APBD, dimana pelaku usaha yang berkepentingan terhadap pemasangan iklan tersebut membayar pajak dalam jumlah tertentu untuk pemasangan reklame dalam durasi tertentu di wilayah-wilayah strategis Kabupaten / Kotamadya. Selain itu reklame yang tertata dengan baik di suatu wilayah dapat berfungsi edukatif dengan mensosialisasikan pesan-pesan yang mendidik kepada masyarakat, serta ikut serta mempercantik wilayah tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat sekaligus upaya penanggulangannya

Perda Kabupaten Sampang nomor 16 tahun 2008 tentang retribusi izin pemasangan reklame, menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau terhadap suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang pada tanggal 3 Agustus 2012

dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan oleh Pemda.¹⁴ Namun demikian para pemasang reklame kurang memperhatikan kondisi maupun masa berlakunya reklame sehingga pegawai Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang merasa kesulitan dalam menangani hal ini, khususnya reklame yang berukuran besar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Seksi Reklame, sebagai berikut:¹⁵

“Permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dalam memberikan Izin Pemasangan Reklame adalah jika para pemasang reklame tidak pernah melihat masa berlakunya reklame sehingga kita/ KP3M melakukan monitoring reklame yang sudah habis masa berlakunya”

Selain persoalan itu, banyak pemasang yang mengabaikan aspek ekologi. Salah satunya melakukan penebangan pohon terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan reklame. Aksi ini dilakukan untuk mendapatkan tempat yang strategis. Selanjutnya bekas pohon tersebut dibuat untuk menancapkan tiang reklame. Terlebih lagi, pemasang melakukan pemotongan pohon yang dianggap menghalangi pandangan reklame. Hal ini juga disampaikan informan penelitian:¹⁶

“Kalau memasang reklame tidak aturan, ini kan bentuk kejahatan atau pengrusakan terhadap lingkungan. Yang lebih ngeri lagi, terkadang ada beberapa oknum yang melakukan tindakan dengan meracuni pohon hanya untuk kepentingan reklamenya. Ini menurut saya oknum yang melakukan harus ditindak tegas”

Hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil observasi, bahwa masih adanya pemasang reklame bando di tengah taman dengan melakukan pengecoran. Tindakan ini juga tidak bisa dibenarkan. Air hujan tidak bisa masuk ke air bawah tanah, tapi melintas bersama dengan banjir yang sering terjadi di sepanjang jalan yang ada. Bisa dikatakan, pemasangan reklame di taman kota tidak mengutamakan keserasian antara bangunan dan estetika. Sehingga keindahan kota ini terkesan semrawut. Selain itu pemasangan reklame yang diletakkan di pohon-pohon dan penempatan reklame yang tidak bertema. Pemasangan reklame di pohon, sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Sisa paku untuk menempelkan reklame tersebut masih sering tidak dicabut dan ditinggalkan menancap begitu saja di pohon. Oleh karena itu, kepentingan komersil pemilik reklame tidak boleh melanggar prinsip pelestarian lingkungan. Pohon sebagai salah satu bagian dari konsep tanaman hijau yang berfungsi menyerap udara-udara tidak boleh terancam kehidupannya oleh tindakan pemasangan reklame sembarangan. Dengan demikian diperlukan keseriusan dan upaya Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

¹⁴ Perda Kabupaten Sampang No 16 Tahun 2008 tentang *Retribusi Izin Pemasangan Reklame*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tim Teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang pada tanggal 3 Agustus 2012

¹⁶ Hasil wawancara dengan Masyarakat di Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Agustus 2012

Kabupaten Sampang dalam mengantisipasi maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemasang reklame, seperti yang disampaikan Seksi Reklame:¹⁷

“Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang untuk menghadapi berbagai pelanggaran tersebut, telah dilakukan dengan memberikan informasi kepada pemilik reklame untuk menulis dan membuat kesepakatan mengenai masa berlakunya reklame habis sekaligus sanksi jika melanggar”.

Tindakan antisipasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang kurang maksimal, mengingat banyaknya Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang. Berikut ini adalah jumlah izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang:¹⁸

Tabel 5
Jumlah Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang

| Jumlah izin pemasangan reklame | Tahun | | |
|--------------------------------|-------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| | 159 | 100 | 96 |

Sumber: Data Sekunder, KPPPM Kabupaten Sampang 2012, diolah

Berdasarkan tabel di atas jumlah izin pemasangan reklame di Kabupaten Sampang mulai tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan. Walaupun demikian tetap menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dalam rangka penanganan dan penataan reklame dengan cara membandingkan kondisi di lapangan dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Sehingga dapat menata wilayah supaya lebih baik, dengan cara memperbaiki ketidakteraturan penataan reklame dan mencari solusinya, sehingga estetika daerah akan tercapai sesuai dengan visi Kabupaten Sampang “Sampang Bersatu untuk Kesejahteraan Umat” Sedangkan misi Kabupaten Sampang adalah membangun harmoni sosial untuk menciptakan masyarakat yang rukun, aman dan damai. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkualitas.

Dari hasil observasi, bahwa kesalahan dari pemasang reklame dan spanduk itu adalah menggunakan paku untuk menempelkan di sejumlah pohon. Sehingga selain membuat kesan kumuh dalam sepanjang jalan, juga merusak kehidupan pohon. Dengan demikian sudah saatnya masyarakat segera menyampaikan hal ini pada Satpol PP untuk melakukan tindakan dan pencopotan reklame, spanduk tanpa izin tersebut. Kalaupun sudah mengantongi izin jika dipasang pada tempat yang salah, tentu akan tetap perlu dicopot, karena aturannya sudah jelas,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Oprasional Satpol PP Kabupaten Sampang pada tanggal 2- Agustus- 2012

¹⁸ Dokumen Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang, 2012

pemasangan sepanduk itu seharusnya pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini juga disampaikan oleh informan penelitian:¹⁹

“Banyaknya reklame liar yang terpasang mestinya menjadi perhatian serius dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang. Kalau sampai ada reklame yang dipasang tanpa izin, jangan dibiarkan, harus segera ditertibkan. Satpol PP mestinya jeli, sehingga begitu reklame tersebut terpasang, harus bertindak tegas dengan menurunkannya tanpa kompromi. Perusahaan pemilik reklame harus diberi sanksi”.

Dengan mengacu hasil wawancara tersebut memang petugas satpol PP tidak tinggal diam, mereka terus berupaya untuk menertibkan reklame liar walaupun banyak menemui kesulitan, seperti saat peneliti temui satpol PP mencabut reklame liar dengan petugas menggunakan satu truk satpol PP dan dua truk bak terbuka. Pembongkaran reklame dimulai sekitar pukul 09.00, setelah 30 personel satpol PP. Selanjutnya, petugas penegak perda tersebut bergerak menuju titik yang telah ditentukan. Namun, sesampainya di lokasi, anggota dan Kasatpol PP tampak kebingungan untuk merobohkan reklame permanen tersebut. "Reklame ini tidak bisa langsung dirobohkan dengan tali. Harus digergaji. Ayo, ada yang ikut saya beli gergaji besi," kata ketua satpol PP sambil mengajak salah satu anak buahnya. Sekitar 20 menit kemudian, ketua satpol PP kembali dengan membawa alat yang dibutuhkan. Kemudian, anggota satpol PP memasang tali dan memotong besi penyangga reklame.

Meskipun telah memakai gergaji besi, mereka kewalahan memotong besi penyangga reklame. Terlebih lagi ukuran gergaji sangat kecil, sedangkan besi yang dipotong diameternya cukup besar. Awalnya kami kira bisa dirobohkan dengan ditarik, ternyata bagian bawahnya dicor. Jadi perlu dipotong," kata Kasi Penegakan Perda Satpol PP. Setelah dirobohkan, reklame dengan tinggi sekitar 4 meter itu diangkut ke truk satpol PP secara ramai-ramai. Usai dari selatan, satpol PP bergeser ke sebelah utara. Di tempat ini petugas menertibkan satu reklame berukuran besar. Menurut ketua satpol PP, pembongkaran dilakukan karena reklame tersebut mengganggu keindahan kota dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang retribusi izin pemasangan reklame. "Tidak ada alasan lain selain harus ditertibkan," tegasnya. Karena itu, ketua satpol PP mengimbau dan berharap kesadaran perusahaan untuk tidak memasang reklame, baliho, dan lainnya di lokasi yang dilarang. "Kami tidak akan pandang bulu. Siapa pun itu tetap kami tertibkan," tandasnya. Hal ini juga disampaikan oleh Seksi Reklame:²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pemasang Reklame di Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Agustus 2012

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Oprasional Satpol PP Kabupaten Sampang pada tanggal 2 Agustus 2012

”Reklame yang kita turunkan paksa karena pemiliknya tidak merespons surat yang kami ajukan, salah satunya sarung tenun. Saat ini ada 23 titik reklame tersebut terdiri dari billboard dan big banner yang berlokasi di tiga kecamatan. Sampai saat ini ada 9 reklame di satu tempat yang berhasil di tertibkan”.

Penertiban reklame liar di Kabupaten Sampang harus dilakukan terus untuk menjaga ketertiban dan keindahan di Kabupaten Sampang. Banyaknya reklame politik tanpa memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Sampang tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tapi juga merugikan masyarakat karena lenyapnya ruang terbuka. Penertiban reklame ukuran di bawah delapan meter persegi yang saat ini menjamur akan dilakukan Satpol PP Kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penertiban yang akan dilakukan Tim Penertiban Reklame. Menyadari permasalahan tersebut diatas, maka dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak akan adanya suatu kajian penanganan dan penataan Reklame di Kabupaten Sampang yang dapat mempermudah tugas satuan kerja yang bertanggungjawab dalam menertibkan ijin pemasangan reklame, menginventarisasi sekaligus melakukan pemantauan atas reklame-reklame terpasang pada suatu kawasan tertentu. Dengan demikian diperlukan kajian penanganan dan penataan reklame sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam pengambilan kebijakannya, dengan melakukan :

- a. Mengidentifikasi permasalahan dilapangan mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Sampang.
- b. Mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah dari reklame
- c. Mengevaluasi kebijakan dan peraturan reklame yang ada di Kabupaten Sampang
- d. Merencanakan Penanganan dan Penataan Reklame yang sesuai estetika lingkungan dan peraturan yang ada Kabupaten Sampang.

Berdasarkan peninjauan dan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti menemukan permasalahan yang sangat menonjol dalam proses perijinan penyelenggaraan reklame yang masih dianggap kurang sesuai dengan mekanisme proses perijinan penyelenggaraan reklame (reklame insidental) terutama dalam penempatan atau peletakan reklame. Hal tersebut ternyata tidak lepas adanya masalah dalam pelaksanaan Efektivitas Peletakan reklame terlihat dari indikator, sebagai berikut:

1. Belum efektifnya teknis penempatan dan pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame tentang petunjuk penyelenggaraan reklame dengan kenyataan yang ada dilapangan. Contohnya terdapat kategori ketentuan penempatan dan pemasangan reklame berdasarkan kriteria yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu pejalan kaki, pengendara, atau pengguna jalan yang lain
 - b. Tidak menggagu visual wajah kota

- c. Tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada
 - d. Tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum
 - e. Naskah dan gambar reklame tidak meresahkan masyarakat, tidak melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan
2. Belum tertatanya dengan baik pola perizinan penyebaran dan peletakan reklame, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya reklame incidental (atribut-atribut kampanye dan baliho-baliho caleg perseorangan) yang menempel atau dipasang di lokasi-lokasi pendidikan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, adapun penyebab masalah tersebut diduga karena implementasi kebijakan pada bagian reklame Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang belum sepenuhnya melaksanakan empat tepat implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Kebijakan Petunjuk Perijinan Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Sampang yang belum diimplementasikan secara efektif, hal ini menyebabkan teknis penempatan dan pemasangan reklame belum berjalan optimal, misalnya: mengenai teknis penempatan dan pemasangan reklame belum direalisasikan dalam bentuk pengawasan dan penertiban sehingga masih banyak reklame insidental (atribut-atribut kampanye dan baliho-baliho caleg perseorangan) yang masih menggangu fasilitas-fasilitas publik dan utilitas umum.
2. Belum sesuainya pola penyebaran dan peletakan reklame terutama pada titik kawasan bebas reklame, hal ini diakibatkan belum optimalnya perhatian dari dinas pertamanan Kabupaten Sampang mengenai pola penyebaran dan peletakan reklame. Misalnya: tidak adanya pengawasan atau survey langsung kelapangan mengenai pola penyebaran dan peletakan reklame terutama kawasan bebas reklame, sehingga belum ada kebijakan prioritas yang konkret untuk menangani masalah penataan reklame, khususnya pada kawasan bebas reklame tersebut.

Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan harus diterapkan berdasarkan pasal 12 Perda nomor 16 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang agar sasaran /tujuan yang ingin dicapai dapat optimal. Salah satu implementasi kebijakan pemerintah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah Implementasi Kebijakan tentang penyelenggaraan reklame khususnya mengenai mekanisme penyelenggaraannya.

D. Kesimpulan

1. Secara umum pada saat ini tata cara penanganan dan penataan reklame yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup baik, namun memerlukan suatu dukungan dan motivasi yang lebih baik lagi baik dari segi estetika, secara arsitektual maupun lingkungan, serta dari segi manajemen yang berorientasi kepada efisiensi dan keindahan wilayah, bukan kepada tujuan yang terkadang mengabaikan sisi lainnya.

2. Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame telah dilakukan dengan baik walaupun belum maksimal, seperti membongkar semua reklame liar yang ada di sekitar jalan provinsi di Kabupaten Sampang. Begitu juga mengenai prosedur pemberian Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan peraturan yang ada yang tidak melanggar norma agama dan norma kesusilaan.
3. Faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang no 16 tahun 2008 tentang retribusi izin pemasangan reklame adalah jika para pemasang reklame tidak pernah melihat masa berlakunya reklame sehingga KP3M melakukan monitoring reklame yang sudah habis masa berlakunya. Begitu juga memasang reklame tidak aturan dan terkadang ada beberapa oknum yang melakukan tindakan dengan meracuni pohon hanya untuk kepentingan reklamenya.
4. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang untuk menghadapi berbagai pelanggaran tersebut, telah dilakukan dengan memberikan informasi kepada pemilik reklame untuk menulis dan membuat kesepakatan mengenai masa berlakunya reklame habis sekaligus sanksi jika melanggar. Adanya reklame yang diturunkan atau dibongkar paksa karena pemiliknya tidak merespons surat yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Aini, Hamdan. 1985. *Perpajakan*. Bina Aksara. Yogyakarta
- Ateng, Syarifudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta
- Bintaro, Tjokroamidjojo. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Cet ke-4.
- Irfan, Islamy M., 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Edisi 2, Cetakan 13. Bumi Aksara. Jakarta
- Koho, Josef Riwu. 1995. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mundzir, Muhammad, 1996. *Definisi Reklame*, cetakan keempat, alumni bandung
- Sholichin, Abdul, Wahab S. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Supanji, Babad. Dkk. 2004. " *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*". Humaniora

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin
Pemasangan Reklame